



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRA NOFILAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 159125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 526.050.000

1. Tanah Seluas 480 m2 di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/90 m2 di , HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 67 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 76.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LX SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO DD2 1 , 3 S A/T / MICRO/MINIBUS Tahun
2013, HADIAH Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 69.893.398

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 717.443.398

III. HUTANG Rp. 69.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 647.843.398

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.